



**RISALAH SIDANG
BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA
PERSIAPAN KEMERDEKAAN
INDONESIA
(BPUPKI)**

**PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN
INDONESIA
(PPKI)**

28 MEI 1945 - 22 AGUSTUS 1945

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) - Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945–22 Agustus 1945/Penanggung Jawab merangkap Penyunting Penyelia, Saafroedin Bahar; Penyunting, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati; Kata Pengantar, Taufik Abdullah—Ed.III, Cet.2—Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995.

xxxi, 525 hal.: ilus. ; 25 cm. lamp.

Bibliografi.

Indeks

Biodata

ISBN 979-8300-00-9

I. Indonesia – Sejarah – Persiapan Kemerdekaan, 1945

I. Bahar, Saafroedin II. Kusuma, Ananda B. III. Hudawati, Nannie
IV. Abdullah, Taufik

959.803

Gambar kulit oleh Pusat Grafika Indonesia—Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.


Tidak dibenarkan menyalin atau menyebarkan buku ini tanpa izin terlebih dahulu dari Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Cetakan pertama : edisi I - 1980 Cetakan keempat : edisi II - 1993

Cetakan pertama : edisi II - 1992 Cetakan kelima : edisi II - 1993

Cetakan kedua : edisi II - 1992 Cetakan pertama : edisi III - 1995

Cetakan ketiga : edisi II - 1993

Cetakan kedua : edisi III - 1995, dicetak oleh  GHALIA INDONESIA untuk umum atas izin Menteri Sekretaris Negara RI dengan Surat No.: B-88/M. Sesneg/5/1995 tanggal 5 Mei 1995.

Tim Penyunting Buku

Penanggung Jawab merangkap Penyunting Penyelia

Drs. Saafroedin Bahar

Penyunting

Ananda B. Kusuma, Dra. Nannie Hudawati

Penasihat Ahli

Prof. Dr. Taufik Abdullah; Dr. Abdurrachman Surjomihardjo (Alm.);

Poedjo Moeliono, S.H.; Drs. Djoko Utomo M.A.; Kolonel Drs. Saleh

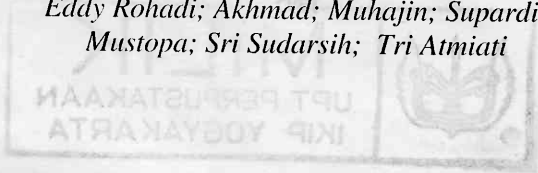
Djamhari; Dr. Anhar Gonggong; Dr. Sri Soekesi Adiwimarta

Pembantu Teknis

Nani Duryani; Armadi Chaniago;

Eddy Rohadi; Akhmad; Muhajin; Supardi;

Mustopa; Sri Sudarsih; Tri Atmiati



Bagian I

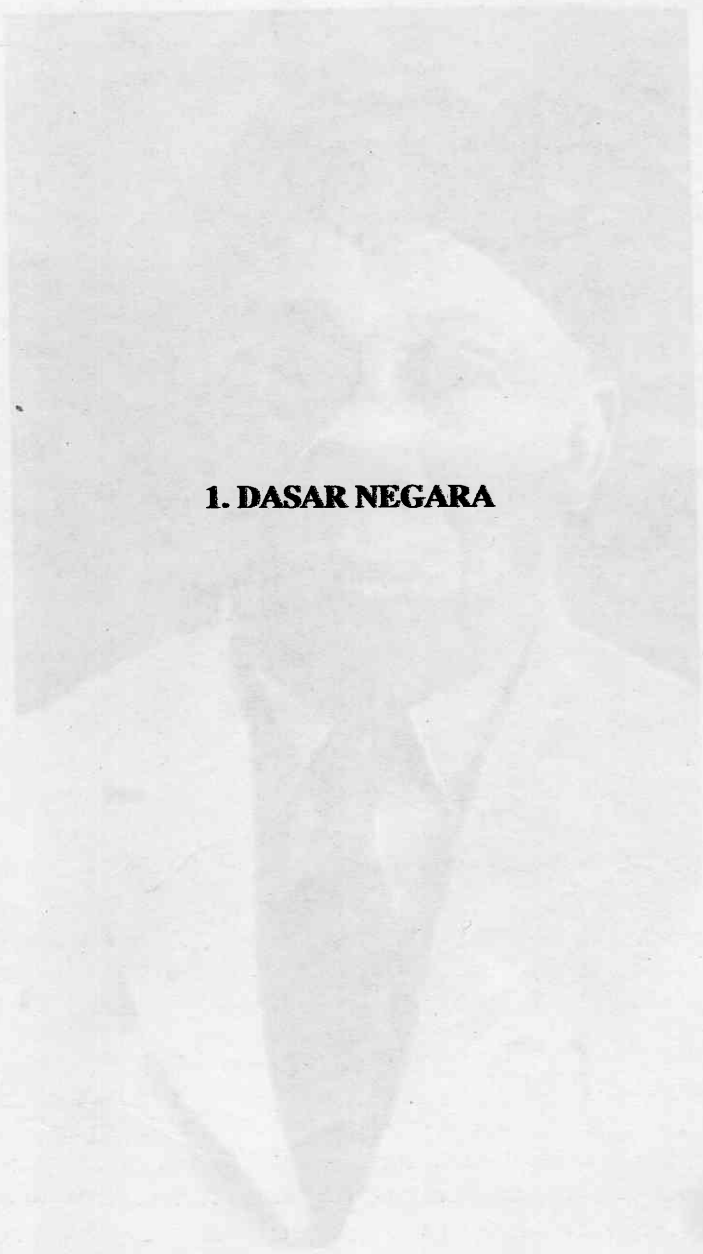
Sidang

**BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA
PERSIAPAN KEMERDEKAAN
INDONESIA
(BPUPKI)**

TANGGAL 28 MEI - 1 JUNI 1945

dan

TANGGAL 10 - 17 JULI 1945



1. DASAR NEGARA

Dr. A. R. T. Azis, M. A., Ph. D.

© Sinar Baru Alfabeta, 2000

BADAN PENYELIDIK USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Sidang Pertama

Rapat Besar tanggal 29 Mei 1945

Acara : Pembicaraan tentang Dasar Negara Indonesia

Ketua : Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat / R.P. Soeroso ¹⁾

(Sidang Pembukaan oleh Ketua)

Anggota MUH. YAMIN

A. Kerangka Uraian

Pekerjaan Panitia Usaha Istimewa—Anggota berpendirian sebagai orang Indonesia—Harapan masyarakat.

I. *Peri-Kebangsaan*

Indonesia Merdeka, sekarang—Nationalisme lama dan baru—Dasar Negara Sriwijaya dan Majapahit—Perubahan zaman—Dasar Peradaban Indonesia—Tradisi tata negara yang putus—*Etat national—etats patrimoines, etats puissances*—kesukaran mencari dasar asli—Cita-cita yang hancur di medan perjuangan. Kebangsaan Indonesia mengharuskan dasar sendiri.

II. *Peri-Kemanusiaan*

Kemajuan kemerdekaan—Kemerdekaan akan menghidupkan kedaulatan negara—Anggota keluarga—dunia—Status politik yang sempurna—Menolak dominion status, *protectoraat*, mandat, *Atlantic Charter* pasal 3—Status internasional yang berisi kemanusiaan dan kedaulatan sempurna.

III. *Peri-ke-Tuhanan*

Peradaban luhur—Ber-Tuhan—Dasar negara yang berasal dari peradaban dan agama.

IV. *Peri-Kerakyatan*

A. Permusyawaratan: Surat Asyasyura ayat 38—Kebaikan musyawarat—Musyawarat dalam masyarakat dalam semasa

¹⁾ Naskah Pidato, Mr. M. Yamin tidak ditemukan dalam "Koleksi Mr. M. Yamin" maupun "Koleksi Pringgogidgo" yang tersimpan di Arsip Nasional.

khalif yang empat dan sesudah itu—Musyawarat bersatu dengan dasar muafakat menurut adat—Perpaduan adat dengan perintah agama.

- B. Perwakilan: Dasar adat yang mengharuskan perwakilan—Perwakilan sebagai ikatan masyarakat di seluruh Indonesia—Perwakilan sebagai dasar abadi bagi tata negara.
- C. Kebijaksanaan: Rasionalisme—Perubahan dalam adat dan masyarakat—Keinginan penyerahan—Rasionalisme sebagai dinamika rakyat.
 - 1. Fahaman Negara Indonesia: Membuang dasar negara filsafatiah (Plato, Aristoteles, Thomas More)—6 Gabungan Dasar dan fahaman yang ditolak—9 Gabungan Dasar dan fahaman yang diterima—Kesimpulan Negara Kesejahteraan Rakyat Indonesia; dan terbentuknya Republik Indonesia yang berdasar nasionalisme—unitarisme.
 - 2. Pembelaan: Dasar syuriah menimbulkan perang jihad—Perwakilan secara adat menimbulkan tenaga keraman—Kebijaksanaan teknik dan siasat perang—Balatentara kebangsaan Indonesia.
 - 3. Budi Negara: Dahulu dan sekarang—1. Setia Negara—2. Percaya akan tenaga rakyat—3. Ingin Merdeka.

V. *Kesejahteraan Rakyat*

Keadilan Sosial

Kegembiraan dalam Negara Baru—Perubahan bagi Republik Rakyat Kesejahteraan.

B. Presentasi Lisan

PERMULAAN

Tuan Ketua yang mulia, Rapat yang terhormat!

Angkat bicara dalam rapat Panitia Penyelidikan Indonesia Merdeka ini memberi ingatan kepada kita, bahwa kewajiban yang terpikul di atas kepala dan kedua belah bahu kita, ialah suatu kewajiban yang sangat teristimewa. Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan, yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat Indonesia dengan kurban dan darah daging sejak beratus-ratus tahun, adalah suatu kesempatan besar yang belum pernah dialami oleh bangsa Indonesia

dalam zaman yang lampau, entahlah agaknya pula tidak akan perlu dialami lagi sesudah turunan bangsa sekarang. Sekiranya sumbangan rohani daripada kita berhasil dan memberi akibat yang sempurna, maka tak kunjung lagi datanglah zaman gemilang bagi rakyat Indonesia seluruhnya, yang akan diliputi oleh suatu negara peradaban yang makmur dan bersifat adil. Kegembiraan memberi sumbangan rohani itu adalah pula sepadan dan selaras dengan keinginan rakyat: "*Mau merdeka*" dan "*ingin bernegara berkedaulatan*".

Menyumbangkan bahan-bahan untuk panitia dan menyelidiki beberapa keadaan-keadaan penting adalah dengan keinsafan untuk Negara Indonesia seluruhnya. Di tanah Selatan, memang Pulau Jawa berisi sebagian besar penduduk Indonesia yang dalam beberapa hal berpusat kemari: Pulau Jawa memang pusat dan jantung kegiatan kepulauan Indonesia. Tetapi dalam menyelidiki bahan-bahan untuk Negara Indonesia, maka kita haruslah bertindak sebagai orang Indonesia, yaitu dengan memperhatikan masalah-masalah, soal-soal dan keadaan istimewa di Pulau Borneo, Selebes, Maluku, Sunda Kecil, Malaya dan Sumatra. Melupakan kemestian adalah mempersempit kedudukan Negara Indonesia, dan memperhatikan berarti mendekatkan kita kepada keadaan yang sebenarnya. Tetapi dengan bekerja seperti itu pekerjaan makin bertambah, dan beberapa soal bertambah muskil. Sebaliknya Negara Indonesia tak dapatlah didudukkan di atas hasil penyelidikan bahan-bahan yang didapat di Pulau Jawa saja, karena keadaan itu boleh jadi menyesatkan pandangan dan sedikit-dikit mungkin melanggar pendirian kita. Sejak dari sekarang hendaklah meliputi seluruh keadaan-keadaan di segala pulau Indonesia dengan pikiran yang sudah meminum air persatuan Indonesia. Kita mendirikan Negara Indonesia atas keinsafan akan pengetahuan yang luas dan lebar tentang seluruh Indonesia. Besar keyakinan saya, bahwa kita semuanya jangan memutuskan harapan masyarakat Indonesia ini.

I. PERI KEBANGSAAN

Tuan Ketua, sekarang sampailah waktu saya akan membicarakan negara kebangsaan Indonesia. Adapun keinginan "Indonesia Merdeka sekarang", memang pada waktu ini mendesak menjadi umum dan semboyan itu dipangku oleh segala lapisan, di sini keras, di sana mulai meresap. Tetapi juga jikalau sekiranya pelaksanaan Indonesia Merdeka itu kini juga, tidak nanti melainkan saat ini juga harus dilakukan, maka di antara semboyan dengan berjalannya Negara Indonesia itu adalah tiga usaha yang tidak boleh tidak harus dilakukan. *Pertama* ialah pekerjaan

kita anggota panitia mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara, dan *kedua* pengurus Undang-Undang Dasar negara yang menyusun bahan pilihan itu dan *ketiga* menjalankan isi hukum dasar negara itu dalam negara yang lalu terbentuk. Ketiga usaha ini harus diperas menjadi satu paduan, jikalau sekiranya keinginan rakyat yang tersimpan dalam semboyan "Indonesia Merdeka, sekarang" hendak disesuaikan dengan usaha kita.

Dengan sendirinya lalu kita panitia bersama-sama rakyat menghadapi suatu pekerjaan yang mahahebat dalam pertukaran zaman di samping perjalanan sejarah kita. Kita menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk menyusun negara baru dengan melaksanakan susunan negeri dalam waktu yang singkat dan dalam waktu sangat bergoyang. Negara baru yang akan kita bentuk, adalah suatu negara kebangsaan Indonesia atau suatu *nationale staat* atau suatu *Etat National* yang sejajar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan. Negara Indonesia ini ialah sebagian menjadi pelaksanaan keinginan rakyat Indonesia sekarang dan sebagian lagi sebagai usaha dalam beberapa ratus tahun. Keinginan itu sumbernya dalam nasionalisme atau dalam dasar kebangsaan yang mengikat kita seturunan dan sesama kemauan; bukanlah menurut nasionalisme lama, melainkan menurut nasionalisme baru, yang berisi faham hendak mempersatukan rakyat dalam ikatan sejarah yang dilindungi mereka. Inilah lain dan bedanya nasionalisme Indonesia zaman sekarang daripada usaha rakyat Indonesia waktu mendirikan susunan kenegaraan Indonesia waktu terbentuk dalam negara Syailendra-Sriwijaya (600–1400) yang beratus-ratus tahun lamanya; di sanalah bedanya usaha kita sekarang daripada rakyat Indonesia waktu mendirikan Negara Indonesia kedua, seperti terbentuk dalam Kerajaan Majapahit (1293–1525). Negara Indonesia pertama dibentuk dan dijunjung oleh rakyat keturunan yang memakai dasar *kedatuan* yang selaras dengan kepercayaan purbakala (*kesaktian-magie*) dan agama Buddha Mahayana. Negara Indonesia kedua disusun atas faham *keperabuan*, dan bersandar kepada paduan agama Syiwa dan Buddha, menjadi agama Tantrayana. Negara Indonesia ketiga yang segera akan datang adalah pula negara kebangsaan dan berke-Tuhanan.

Tentang dasar negara itu, tak dapatlah dilanjutkan dasar *kedatuan* atau dasar *keperabuan* secara dahulu itu, karena tradisi kenegaraan antara runtuhnya tata negara kedua dengan Negara Indonesia Merdeka, tidak bersambung, melainkan sudah putus. Rakyat Indonesia sekarang tak dapat diikat dengan dasar dan bentuk tata negara dahulu, karena

perubahan dan aspirasi kita sekarang jauh berlainan daripada zaman yang dahulu itu.

Agama sudah berlainan, dunia pikiran sudah berbeda dan susunan dunia telah berubah.

Dasar peradaban Indonesia

Walaupun demikian, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia; orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur. Itulah sebabnya, maka dasar kebangsaan bagi Negara Indonesia hendaklah dicari tidak dalam susunan negara *bagian atas* dalam zaman dahulu, walaupun dalam zaman emas sekalipun, karena dalam 400 tahun ini sejak runtuhnya kerajaan kedua, tradisi tidak bersambung lagi sampai sekarang. Juga kita tak boleh bercermin atau meniru-niru dasar susunan kerajaan kecil-kecil sesudah tahun 1500. Nasihat ini dapat diberi alasan dengan menyelidiki keadaan susunan tanah Indonesia seluruhnya diliputi oleh negara malahan pula seluruh Indonesia tidaklah pula habis terbagi atas beberapa kerajaan. Kerajaan-kerajaan kita dalam zaman kegelapan ini tidak mempunyai daerah yang terbatas, tidak mempunyai pembagian pemerintahan yang tetap, dan penduduknya tidak berhubungan dengan kerajaan-kerajaan itu secara perhubungan keputraan negara. Pada waktu ini banyaknya kerajaan daerah di tanah Indonesia adalah kira-kira 300 buah.

Di antara segala kerajaan daerah ini tidaklah satu yang bersifat etat national, hampir semuanya bercorak negara-pusaka (*etats patrimoines*), dan barangkali entahlah satu-dua masih bersifat negara kekuasaan (*etats puissances*). Antara etat national atau negara kebangsaan pertama dan kedua dengan susunan Negara Indonesia ketiga, maka dengan ganasnya tradisi tata negara telah putus dan kerajaan daerah yang kira-kira 300 banyaknya itu tidak dapat dijadikan bahan untuk negara yang dicita-citakan.

Walaupun begitu, kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya.

Kita memang tak dapat melihat kepada susunan tata negara bagian atas pada zaman dahulu, dan kita bercermin ke dalam 300 kerajaan daerah, karena dalam keinginan kita hendak ber-etat national yang ketiga, kita tidak mabuk dengan hiburan menyembah kerajaan-kerajaan *seribu satu malam* atau bertanam pohon beringin di atas awan, melainkan melihat kepada peradaban yang memberi tenaga yang nyata dan kekuatan yang maha dahsyat untuk menyusun negara bagian bawah. Dari peradaban

rakyat zaman sekarang, dan dari susunan Negara Hukum adat bagian bawah, dari sanalah kita mengumpulkan dan mengumpulkan sari-sari tata negara yang sebetul-betulnya dapat menjadi dasar negara.

Tetapi membulatkan pikiran dalam kegoyangan zaman peperangan dunia ke dunia sekarang ini, adalah pula suatu kesulitan yang tidak berhingga. Kesulitan itu tidak saja mengenai cara berpikir, tetapi juga karena melihat beberapa dasar dan cita-cita yang telah hancur luluh di medan peperangan, di lautan, di udara, dan di daerah daratan. Sisa-sisa dasar dan cita-cita yang masih tegas lurus dapat dipertahankan oleh kemenangan senjata, bilangannya tidak begitu banyak.

Dalam keadaan yang seperti itu, perjalanan pikiran untuk kebaikan Negara Indonesia yang kita selidiki itu dengan sendirinya tidak tertuju kepada beberapa cita-cita yang telah hancur luluh dalam mahayuda sekarang, melainkan ditujukan kepada peninjauan diri sendiri sebagai bangsa yang beradab. Dengan penuh keyakinan, bahwa negara itu berhubungan rapi hidupnya dengan tanah air, bangsa, kebudayaan, dan kemakmuran Indonesia, seperti setangkai bunga berhubungan rapi dengan dahan dan daun, cabang dan urat bersama-sama dengan alam dan bumi; seperti tulang, darah, dan daging dalam badan tubuh yang berjiwa dan bernyawa sehat, maka kewajiban kita yang pertama kali menyusuli dasar hidup kita ke dalam pangkuan haribaan kita sendiri, sebelumnya kita membicarakan bentuk, cara memerintah dan susunan Pemerintah nanti. Negara Indonesia disusun tidak dengan meminjam atau meniru negeri lain, dan bukan pula suatu salinan daripada jiwa atau peradaban bangsa lain, melainkan semata-mata suatu kelengkapan yang menyempurnakan kehidupan bangsa yang hidup berjiwa di tengah-tengah rakyat dan tumpah-darah yang menjadi ruangan hidup kita sejak purbakala; kelengkapan itu hendaklah sesuai dengan sifat keinginan rakyat Indonesia sekarang.

Dan sifat keinginan itu memang dapat disusul dengan jelasnya dalam peradaban bangsa Indonesia yang memeluk agama dan hidup beradab dan mempunyai pikiran pembaruan, yang menandakan, bahwa yang akan diberi negara adalah suatu bangsa yang berkebudayaan tinggi, berjiwa dan berkeadaban luhur. Maka dengan sendirinya si pembicara ini menyusun dasar negara itu dalam adat, agama, dan otak Indonesia, dan menurut pendapatnya dalamnya memanglah tersimpan persesuaian dasar yang akan menjadi sendi pembentukan negara.

Bekerja dan berpikir secara begini memberi peringatan kepada kita yang hendak menyusun negara bagi turunan rakyat pada waktu ini dan pada hari yang akan datang. Pokok-pokok aturan dasar Negara Indonesia

haruslah disusun menurut watak peradaban Indonesia, dan jikalau hanya dengan meniru atau menyalin *constitutie* negara lain, maka negara tiruan yang akan dipinjamkan kepada Indonesia tentulah tidak akan hebat dan dalam sedikit waktu saja akan jatuh layu sebagai bunga patah di tangkai. Peradaban dan keinginan kita sebagai bangsa hendaklah memberi corak kepada negara yang akan terbentuk itu.

Negara Republik Indonesia yang diinginkan oleh bangsa Indonesia sebagai negara ketiga dalam perjalanan sejarah, ialah suatu negara kebangsaan Indonesia, suatu etat national.

Pinjaman, salinan, tiruan dan turut-turutan dari hukum dasar atau peradaban luaran hanyalah boleh dijadikan cermin saja. Kita tidak menghargakan bayangan dalam cermin, melainkan kita semata-mata berkeinginan hendak memberi wujud dan pelaksanaan kepada kemauan jiwa dan keinginan cita-cita rakyat.

II. PERI KEMANUSIAAN

Tuan Ketua dan rapat yang terhormat! Sekarang saya sampai kepada soal untuk menerangkan faham Indonesia Merdeka.

Sebelumnya kita memikirkan dasar dan moral Negara Indonesia yang pasti akan datang itu, maka perlulah kita menyelidiki lebih dahulu sudah sampai ke manakah kemajuan kemerdekaan pada waktu ini.

Kita masih mengingat, bahwa pergerakan Indonesia Merdeka tidak saja mewujudkan lepas daripada kerajaan Belanda dengan melawan kepada imperialisme Barat dan Amerika, melainkan juga hendak menyusun masyarakat baru dalam suatu negara merdeka. Tujuan Indonesia Merdeka dapat dibaca hampir dalam segala aturan dasar perkumpulan, baik dengan kalimat yang jelas ataupun dengan perkataan yang tidak langsung. Begitu juga tentang susunan negara merdeka, yang beberapa kali dipikirkan bersama-sama dalam beberapa permusyawaratan. Pada waktu ini memang tujuan itu sudah lebih maju daripada dahulu; dan hampir kepada batas yang paling akhir, yaitu terbentuknya negara merdeka.

Maka dalam periode sekarang usaha kemerdekaan masih juga suatu cita-cita yang belum sampai sempurna; tetapi tujuan kemerdekaan sudah sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara.

Maka dengan sendirinya dasar kemerdekaan itu dalam negara akan datang terus berupa kedaulatan menuju ke dalam dan kedaulatan menuju

ke luar, perhubungan dengan keluarga negara-negara lain. Kemerdekaan pertama memberi perlindungan tinggi dan memberi pengawasan luhur kepada putra negara dengan hak milik dan harta-bendanya di dalam lingkaran batasan daerah negara. Kemerdekaan atau kedaulatan ke luar akan memberi kesempatan luas kepada Negara Indonesia mengatur perhubungannya dengan negara lain. Menurut timbangan saya, maka di sinilah pemandangan kita mesti meyakinkan, bahwa tujuan kemerdekaan telah naik beberapa tingkat, sehingga hampir sampai kepada langkah yang paling akhir. Pada langkah yang paling akhir ini maka dasar kemerdekaan menjadi dasar kedaulatan negara, baik tertuju ke dalam ataupun ke luar.

Negara kedaulatan itulah yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, dan hendak memeluk keanggotaan keluarga bangsa-bangsa dengan sepenuhnya. Keanggotaan yang mengatur perhubungan diplomasi secara merdeka dan hendak menandatangani perjanjian atas nama negara sendiri. Usaha membentuk Negara Indonesia itu adalah berisi perjuangan suatu status politik yang berharga sama dengan status internasional yang sempurna. Tujuan itu jelas dan terang. Itulah sebabnya, maka kita bangsa Indonesia dalam peperangan dunia kini menolak bisikan-bisikan musuh yang hendak memberikan status politik yang tidak sempurna. Kita menolak status yang berupa dominion status, walaupun dominion itu akan dinaikkan setinggi langit, kita menolak nasib *protectoraat* atau mandat, walaupun akan dilindungi oleh kerajaan apa sekalipun. Juga kita tidak akan memakai kesempatan yang diberikan oleh *Atlantic Charter* (pasal 3) untuk memilih bentuk pemerintahan yang kita sukai, karena kesempatan itu dalam praktiknya akan ditujukan kepada pembangunan negara yang hendak berjajahan kembali. Dan rakyat Indonesia tetap hendak merebut status politik yang sempurna, sehingga dengan terbentuknya negara merdeka, maka keanggotaannya dapat berlaku di atas dunia dengan leluasa dan tidak terbatas lagi.

Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia Merdeka adalah berdasar perikemanusiaan yang *universeel* b e r i s i humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa.

Dasar peri-kemanusiaan ialah dasar universalisme dalam hukum internasional dan peraturan kesusilaan segala bangsa dan negara merdeka.

III. PERI KETUHANAN

Tuan Ketua! Sampailah saya kepada saat untuk membicarakan dasar-dasar Negara Indonesia Merdeka yang lain. Kita majukan tiga

dasar dari peradaban kita, yang berhubungan langsung dengan pembentukan negara.

Sebelumnya kita berpindah ke soal itu, maka lebih dahulu kita sekali lagi yakinkan, bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang berperadaban luhur, dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya kita insaf, bahwa Negara Kesejahteraan Indonesia Merdeka itu akan berke-Tuhanan. Tuhan akan melindungi Negara Indonesia Merdeka itu.

IV. PERI KERAKYATAN

Kita mulai dengan dasar agama Islam yang menjadi agama rakyat Indonesia dan yang dalam kitab sucinya Quranul Karim, Tuhan menurunkan beberapa firman berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan negara.

A. *Permasyarakatan*

Apabila kita imankan segala ayat Quran yang tertuju kepada pemeliharaan negara, maka bolehlah kita dahulukan surat Asyasyura ayat 38, yang bunyinya:

"Segala urusan mereka dimusyawaratkan"

Perintah ini jelas dan terang. Juga dalam sejarah Rasul Allah dan pada zaman khalif yang empat Alkhulafahurrasyidun, ternyata permusyawaratan bersama itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga oleh pelaksanaan dasar itu maka segala umat atau wakilnya dapat ikut campur dalam penyusunan dan pelaksanaan negara. Musyawarah menjadi kekuatan, karena membuka kesempatan kepada orang yang berkepentingan, membesarkan tanggung jawab warga-negara, dan menimbulkan kewajiban yang tidak mengikat hati.

Lagi pula dalam tiga hal dasar permusyawaratan itu memberi kemajuan kepada umat yang hidup dalam negara yang dilindungi oleh kebesaran ke-Tuhanan.

P e r t a m a: Karena dengan dasar musyawarat itu manusia mem-perhalus perjuangannya dan bekerja di atas jalan ke-Tuhanan dengan membuka pikiran dalam permusyawaratan sesama manusia.

K e d u a: Oleh permusyawaratan, maka negara tidaklah dipikul oleh seorang manusia atau pikiran yang berputar dalam otak sebuah kepala, melainkan dipangku oleh segala golongan, sehingga negara tidak berpusing di sekeliling seorang insan, melainkan sama-sama membentuk negara sebagai suatu batang tubuh, yang satu-satu sel mengerjakan

kewajiban atas permufakatan yang menimbulkan perlainan atau perbedaan kerja, tetapi untuk kesempurnaan seluruh badan.

K e t i g a: Permusyawaratan mengecilkan atau menghilangkan kekhilafan pendirian atau kelakuan orang-seorang, permusyawaratan membawa negara kepada tindakan yang betul dan menghilangkan segala kesesatan.

Juga dalam sejarah Islam, waktu berkembangnya kekuasaan Khalifah yang empat, atau dalam seluruh masyarakat Islam, maka dasar permusyawaratan itu tidak saja diakui, melainkan tetap diamalkan, sehingga peradaban Indonesia sejak berkembangnya agama Islam berisi dan menjalankan dasar itu. Perintah Tuhan yang mewajibkan bermusyawarat untuk urusan umum menjadi dasar masyarakat Indonesia. Negara yang melindungi masyarakat itu hendaklah dibentuk atas keputusan musyawarat dan di dalamnya selalu mewujudkan permusyawaratan itu. Negara yang dibentuk dan negara yang tidak bersandar kepada permusyawaratan adalah negara yang menjauhkan ke-Tuhanan dan melanggar aturan peradaban Indonesia. Di luar peradaban tak adalah suatu masyarakat dan tata negara Indonesia, karena negara dan masyarakat adalah perwujudan musyawarat jua adanya.

Di antara segala negeri-negeri Islam di dunia, barangkali bangsa Indonesialah yang sangat mengemukakan dasar permusyawaratan dan memberi corak yang istimewa kepada pelaksanaan permusyawaratan. Keadaan itu bukan kebetulan, melainkan berhubungan karena dikuatkan oleh sifat peradaban Indonesia asli. Sebelum Islam berkembang di tanah Indonesia, maka sejak zaman purbakala sudah membentuk susunan desa, susunan masyarakat dan susunan hak tanah yang bersandar kepada keputusan bersama yang boleh dinamai kebulatan-bersama atas masyarakat. Dasar kebulatan inilah yang sama tuanya dengan susunan desa, negeri, marga dan lain-lain dan mufakat itulah yang menghilangkan dasar perseorangan dan menimbulkan hidup bersama dalam masyarakat yang teratur dan dalam tata negara desa yang dipelihara untuk kepentingan bersama dan untuk rakyat turun-temurun.

Dasar mufakat tidaklah runtuh atau rusak binasa oleh pengaruh agama Buddha atau agama Hindu, sampai kepada abad ke-16, waktu kerajaan Majapahit runtuh. Dasar mufakat sampai kuat tenaganya, sehingga umurnya lebih panjang daripada agama Buddha dan Hindu di tanah Indonesia.

Setelah agama Islam masuk ke tanah Indonesia dan berkembang ke dalam masyarakat desa, maka dasar mufakat hidup kembali dengan subur, karena dengan segera bersatu dengan firman musyawarat.

Mufakat dari zaman purbakala dan permusyawaratan lalu bersatu-padu dalam peradaban Indonesia. Perpaduan dasar tata negara itu sungguhlah dengan istimewa memberi corak kepada rasa ketatanegaraan Indonesia, karena dalam dasar itu tersimpan ke-Tuhanan dan kesaktian adat pusaka yang memberi cap kepada jiwa rakyat Indonesia.

B. Perwakilan

Sekarang sampailah saya kepada soal jalan perwakilan

Kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak tanah yang semenjak beribu-ribu tahun menjadi dasar negara dan rakyat murba, dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain-lain sebagainya. Susunan persekutuan-persekutuan yang mengagumkan itu pada garis-garis besar tak rusak dan begitu kuat sehingga tak dapat diruntuhkan oleh pengaruh Hindu, pengaruh feodalisme, dan pengaruh Eropa. Desa tinggal desa dan susunan memang dari satu tempat ke tempat lain di seluruh Indonesia berubah-ubah, ada bedanya, sebagai warna intan yang menyilaukan bermacam-macam seri. Segala persekutuan hukum adat di seluruh Indonesia lebih banyak samanya atau serupanya daripada beda yang menandakan kehidupan yang sungguh-sungguh.

Di antara segala tanda-tanda yang menyatakan kekuatan persekutuan-persekutuan itu sehingga tinggal tetap di seluruh masa dan waktu, maka adalah pula susunan persekutuan itu melahirkan suatu sifat yang seolah-olah menjadi gambaran peradaban Indonesia asli yang melindungi persekutuan hukum adat itu. Sifat yang utama itu memberi jaminan kepada sifat perwakilan dan di atas sifat perwakilan inilah terpilih orang yang memegang kekuasaan dan perwakilanlah yang menjadi dasar susunan desa, negeri, dusun, marga, dan lain-lain itu pun jikalau *despotisme* dan *feodalisme* dapat kita singkirkan sebagai penyakit yang istimewa menghinggapai peradaban Indonesia.

Menurut peradaban Indonesia, maka permusyawaratan dan perwakilan itu adalah di bawah pimpinan hikmah-kebijaksanaan yang bermusyawarat atau berkumpul dalam persidangan.

Dasar perwakilan itu ialah tenaga yang kuat dan yang memberi warna dan aliran istimewa kepada keinginan orang Indonesia kepada susunan tata negara. Perwakilan tidaklah saja menguatkan persekutuan hukum adat dalam tata negara bagian bawah, tetapi juga menjadi pedoman dalam keinginan bangsa sekarang dalam menyusun tata negara bagian

tengah dan bagian atas. Suatu Negara Indonesia yang akan dibentuk tentulah tidak menjadi sambungan jiwa tata negara rakyat, apabila sifat perwakilan tidak dipakai. Sebaliknya apabila dasar perwakilan secara Indonesia dilanjutkan sampai kepada segala bagian tata negara dengan mementingkan dasar permusyawaratan dan rasionalisme, maka dengan ringkas kita akan mendapat suatu susunan negara yang sewajar dengan peradaban kita. Lagi pula masuklah dalam tata negara suatu sifat ketatanegaraan Indonesia, yang ternyata kuat dan terbukti sejak dari zaman prae-historia sampai sekarang ini. Dasar perwakilan adalah dasar abadi menurut kebudayaan Indonesia. Bagaimana menjalankan sifat perwakilan itu, buat sementara waktu tidaklah akan dibicarakan panjang lebar dalam bagian ini; menjalankan dasar tata negara semata-mata untuk menentukan secara berpikir dan mencari dasar yang sewajar dengan peradaban Indonesia pada waktu ini dan bagaimanakah baiknya untuk hari yang akan datang. Dengan berpikir secara begini maka kita memberi bentuk dasar dan isi kepada Negara Indonesia menurut dasar ketimuran dan tidak mengenakan baju pinjaman dari peradaban bangsa Barat atau peradaban dari luar. Di dalamnya juga tersimpan niat hendak memberi kekuatan yang tetap kepada negara baru itu.

C. Kebijakanaksanaan

Sampailah saya sekarang ke dasar yang ketiga, jalan kebijakanaksanaan (rasionalisme).

Pembentukan masyarakat dan susunan negara mewujudkan suatu pembaharuan yang memakai dasar yang tangkas. Sudah semestinya pembaharuan itu tidak boleh lepas daripada ke-Tuhanan seperti yang tersebut dalam perintah Tuhan dalam kitab Quran dan harus sejajar dengan ikatan garis besar menurut adat pusaka Indonesia.

Tetapi adat telah banyak kemasukan pengaruh feodalisme zaman Belanda dan dalam adat juga telah terdapat kerusakan-kerusakan karena pemerintahan jajahan. Dalam adat juga telah terdapat bagian-bagian yang tidak menurutkan aliran zaman. Pembaharuan mestilah ada dan pembaharuan ini mengenai mau menyusun negara dengan berke-Tuhanan, memelihara adat supaya sesuai dengan hidup baru dalam negara yang sempurna. Pembaharuan itu dijalankan dengan tenaga pikiran terutama dari kaum terpelajar yang budiman dan berpengetahuan tinggi. Dasar *irrationalisme* dan *prelogisme* hendaklah berangsur-angsur hilang dan dari sekarang Negara Indonesia hendaklah disusun atas logika sebagai akibat dari rasionalisme yang sehat. Dalam lingkungan kebijakanaksanaan pikiran, maka yang sangat mendapat perhatian, yaitu keinginan pergerakan Indonesia yang dahulu dipikirkan menurut rancangan otak golongan

terpelajar yang menyumbangkan tenaga dalam pergerakan. Kita mengakui, bahwa sebagian besar daripada perkumpulan atau partai politik telah dibubarkan dan tidak berhubungan lagi dengan rakyat, tetapi jiwa pergerakan masih terus-menerus berkuasa. Pada waktu ini cita-cita rakyat Indonesia masih dapat dibaca dengan jelasnya dalam dinamika rakyat, yang dahulu digerakkan oleh perkumpulan-perkumpulan yang mempunyai tujuan politik yang teratur. Sejarah empat tahun ini memang menambah tujuan itu, tetapi faham baru masih dipengaruhi oleh tujuan lama yang hidup dalam hati rakyat.

Hikmah kebijaksanaan yang menjadi pimpinan kerakyatan Indonesia ialah rasionalisme yang sehat, karena telah melepaskan dari anarkhi, liberalisme dan semangat penjajahan.

Faham Negara Indonesia

Dasar yang tiga di atas itu membawa kita kepada suatu susunan negara yang berdasar kepada barang dan keadaan yang nyata. Tidaklah kita hanya bekerja di atas meja-tulis di dalam kamar seorang ahli negara yang bercita-cita mengawan. Tidaklah kita bergandengan dengan pikiran-pikiran Plato dengan *Respublica*-nya, Aristoteles dengan *Politea*-nya, Thomas More dengan *Utopia*-nya, melainkan semata-mata kita berlaku: Mendirikan dalam waktu peperangan suatu negara baru yang kuat dan dapat bertahan dengan abadi dalam waktu damai dan perang dan negara itu meliputi seluruh bangsa Indonesia daerah tumpah-darah yang tentu batasnya dengan mengingatkan susunan seperti ternyata dalam persekutuan desa, negeri, marga, dusun, dan lain-lain dan mengingat cita-cita negara yang berkedaulatan. Negara Rakyat Indonesia ini baiklah saya kirakan dasarnya dengan mengemukakan lebih dahulu sifat-sifat yang tidak dapat dipakai dan sifat-sifat yang menurut pikiran saya harus dijadikan syarat mutlak. Sifat dan syarat ini ialah ringkasan dari pikiran-pikiran yang berhubungan langsung dengan dasar yang tiga itu. Negara Rakyat Indonesia adalah lepas daripada syarat-syarat yang tersebut di bawah ini, karena dalam asas tujuannya bertentangan dengan keterangan-keterangan yang tersebut di atas.

1. Negara Rakyat Indonesia menolak segala tata negara atau bagian-bagiannya yang melanggar dasar permusyawaratan, perwakilan dan pikiran.
2. Negara Rakyat Indonesia menolak segala faham:
 - a. federalisme (persekutuan)
 - b. feodalisme (susunan lama)
 - c. monarkhi (kepala negara berturunan)

- d. liberalisme
 - e. autokrasi dan birokrasi
 - f. demokrasi Barat.
3. Negara Rakyat Indonesia menolak segala dasar penjajahan dan segala sisa-sisa yang berasal dari zaman penjajahan Portugis, Inggris, Amerika dan Belanda yang semata-mata dibentuk untuk menguatkan penjajahan kerajaan Belanda atau peradaban Barat.
 Negara Republik Indonesia ialah suatu negara kebangsaan (état national) yang merdeka dan berdaulat penuh.
 4. Negara Rakyat Indonesia menolak faham pemerintahan istibdadî seperti pemerintahan Firaun dan Namrud; menolak faham pemerintahan Khilâah, kekuasaan kerakyatan atas golongan yang berilmu dan berhikmat; menolak faham pemerintahan filsafatîyah, yaitu pemerintahan kekuasaan cerdik pandai atas rakyat jelata.
 5. Negara Rakyat Indonesia menolak segala dasar penjajahan kolonialisme sebagai dasar pembentukan negara.
 6. Negara Rakyat Indonesia menolak segala tindakan yang akan mengecewakan kedaulatan negara dengan menjalankan kebonekaan.

Dengan menolak keenam faham di atas, maka Negara Rakyat Indonesia dengan segala kesucian akan mewujudkan faham-faham yang di bawah ini :

- I. Negara Rakyat Indonesia ialah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk di atas dan di dalam badan bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi.
 Negara Rakyat Indonesia ialah Negara Kesatuan atas faham unitarisme.
- II. Negara Rakyat Indonesia mempunyai *satu kedaulatan* yang dijunjung oleh Kepala Negara, dan oleh daerah dan rakyat Indonesia.
- III. Dalam Negara Rakyat Indonesia maka Kepala Negara, pusat pemerintahan, pemerintah daerah dan pemerintahan persekutuan desa (negeri, marga, dll.) dipilih secara Timur dalam permusyawaratan yang disusun secara rakyat. Negara Rakyat

Indonesia ialah pemerintahan Syuriyah, pemerintahan yang didasarkan atas permusyawaratan antara orang berilmu dan berakal sehat, yang dipilih atas faham perwakilan.

- IV. Permusyawaratan, pemilihan dan pembaruan pikiran menjadi dasar pengangkatan dan segala pemutusan urusan negara.
- V. Negeri, desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibarui dengan jalan rasionalisme dan pembaruan zaman, dijadikan kaki susunan negara sebagai bagian bawah.
- VI. Pemerintah Pusat dibentuk di sekeliling Kepala Negara, terbagi atas :
 - a. Wakil Kepala Negara;
 - b. Satu Kementerian sekeliling seorang Pemimpin Kementerian;
 - c. Pusat Parlemen Balai Perwakilan, yang terbagi atas Majelis dan Balai Perwakilan Rakyat.
- VII. Antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintah Daerah untuk menjalankan Pemerintah Urusan Dalam, Pangreh Praja. Sekarang memulangkan kekuasaan kepada Negara Indonesia dan Pemerintah Urusan Dalam bagi seluruh Indonesia disusun kembali.
- VIII. Negara Rakyat Indonesia menjalankan pembagian pekerjaan negara atas jalan desentralisasi atau dekonsentrasi yang tidak mengenal federalisme atau perpecahan negara.

SOEROSO Wakil Ketua

Tuan pembicara saya rasa salah faham. Sebagai diterangkan oleh tuan Ketua, Tuan Radjiman, tadi yang dibicarakan ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka. Kalau saya dengarkan yang selanjutnya tadi ini juga tentang bentuknya Indonesia Merdeka. Kalau sekiranya sudah cukup hendaklah membicarakan dasar-dasar itu.

Sekarang Tuan saya persilakan .

Anggota MUH. YAMIN

Saya perhatikan dan saya lanjutkan kepada angka ke-9, karena lebih mengenai pokok pembicaraan: Negara Rakyat Indonesia menjadi anggota yang berkedaulatan dalam permusyawaratan bangsa-bangsa sedunia.

Barang siapa mendapat kewajiban menyusun suatu negara menurut dasar yang tiga itu, maka dengan sendirinya dia menolak suatu negara yang hanya disusun sekeliling beberapa orang penganjur saja yang hanya

disusun sekeliling suatu tujuan partai atau mazhab, yang hanya disusun di sekeliling suatu pikiran ahli negara atau menurut suatu perintah dari atas atau dorongan dari suatu pihak.

Dasar yang tiga itu memberi akibat, bahwa negara yang akan dibentuk itu hanya semata-mata untuk seluruh rakyat, untuk kepentingan seluruh bangsa yang akan berdiri kuat di dalam negara yang menjadi kepunyaannya. Adapun Negara Indonesia bukanlah negara satu golongan, Negara Angkatan Atas atau Negara Bangsawan, melainkan dengan segala kesucian suatu Negara Rakyat Indonesia, yang mempertahankan tempatnya di atas dunia.

Pembicaraan bagian atas dapatlah saya ringkaskan, bahwa dasar-dasar yang kita perbincangkan memberi dorongan kepada kita, bahwa negara yang akan dibentuk ialah: Suatu Negara Rakyat Indonesia yang tersusun dalam suatu Republik Indonesia, yang dikepalai oleh seorang Kepala Negara pilihan dan dijalankan sebagai pusat oleh Kementerian yang bertanggung jawab kepada Majelis Musyawarah dan semuanya dilindungi oleh suatu pemerintahan Syuriah yang mewujudkan permusyawaratan, perwakilan dan kebijaksanaan otak, dan terbentuk bagi seluruh bangsa dan tumpah-darah Indonesia yang tidak mengenal perpecahan atau terbagi-bagi.

2. *Pembelaan*

Berhubung dengan itu, Tuan Ketua, maka sampailah saya kepada dasar pembelaan negara. Adapun pengakuan dasar yang tiga itu memberi dasar kepada soal kemiliteran, pembelaan, yang akan mempertahankan negeri dalam waktu perang dengan senjata. Perhubungan pembelaan ini dengan dasar yang tiga itu, yakni: Susunan permusyawaratan secara agama, yang mementingkan dasar atau jalan Syuriah, menimbulkan perang jihad, baik yang besar ataupun yang kecil. Dasar adat memberi akibat perang karena kepada serangan dari dalam dan dari luar negeri, karena *keraman* ialah kemestian yang diharuskan adat membela negeri dengan melawan menjalankan kekerasan kepada kelaliman. Dan rasionalisme menyempurnakan teknik dan disiplin peperangan, dan menyusun siasat perang. Atas dasar tiga itu, maka berdirilah suatu Balatentara yang memakai dasar kebangsaan dan keagamaan, yang berperang dan membela negara menurut dasar yang benar dan sungguh dalam.

3. *Budi Negara*

Tuan Ketua, telah sampai saya kepada dasar budi pekerti negara. Tiap-tiap negara yang terbentuk oleh peradaban yang sempurna perlulah

tidak boleh tidak mempunyai budi pekerti atau moral, negara yang tidak bermoral, tidak mempunyai corak dan warna istimewa. Budi pekerti negara ialah tali perhubungan hati rakyat dengan negara yang melindunginya.

a. *Setia negara.* Negara pertama, kerajaan Syailendera Sriwijaya sanggup menahan gelombang massa, karena mempunyai moral yang dipusatkan pada rasa kebaktian, yang pada waktu itu berarti berwujud setia kepada Negara Kesatuan. Tidak berbakti atau tidak setia kepada negara, ialah satu kesalahan yang sebesar-besarnya, yang mengenai kejujuran hati sanubari seorang putra negara. Negara pertama memang hilang dan runtuh, tetapi kesetiaan kepada rumah-tangga, kesetiaan kepada persekutuan desa dan daerah, kesetiaan kepada bangsa dan tanah air, adalah satu sifat utama orang Indonesia. Jikalau negara baru sudah berdiri, maka setia negara hidup kembali dan menjadi moral yang datang dari hati sanubari segala putra negara. Sifat-sifat bangsa dan tanah air yang kita pusakai itu bertambah lagi dengan sifat pusaka yang ditinggalkan oleh Negara Indonesia kedua. Majapahit mempunyai moral negara, yang menumpahkan kepercayaan yang penuh kepada tenaga rakyat. Majapahit didirikan di Desa Terik pada saat yang mengharukan hati, yaitu di hadapan rakyat dari beberapa daerah pada ketika bangsa Indonesia diperhubungkan dengan bumi Indonesia dengan ayunan pacul orang tani anak Madura yang mengeluarkan peluh-keringat di bawah pohon maja yang daunnya berduri dan buahnya berasa pahit. Keadaan itu memberi tamsil dan anjuran kepada kita, bahwa pembentukan negara kedua didorongkan oleh suatu moral yang yakin akan tenaga rakyat dan berjuang, mengatasi kesukaran hidup dan kepahitan usaha sehingga akibatnya memberi kepuasan hati untuk bersama.

b. *Tenaga rakyat.* Negara kedua menjadi kuat di seluruh Asia Tenggara, terutama setelah tenaga rakyat memuncak dengan hebatnya dalam tangan Gajah Mada, orang rakyat bertenaga rakyat, berbakti kepada keselamatan negara. Juga keyakinan akan tenaga rakyat ini kita wariskan kepada negara ketiga. Tetapi negara ketiga mempunyai pokok-pangkalnya sendiri. Negara Indonesia ialah hasil perjuangan rakyat, karena ingin merdeka. Juga dapat diramalkan, bahwa beratus-ratus tahun sesudah pelantikan Negara Indonesia, maka semboyan dan perjuangan Indonesia Merdeka akan mengisi ingatan dan kalbu turunan kita. Zaman sekarang akan meminta tempat pada lembaran sejarah kebangsaan, sebagai riwayat perjuangan kaum sahabat

dalam sejarah pengembangan agama Islam mendapat tempat istimewa dalam segala buku agama. Moral rakyat Indonesia dalam 400 tahun di waktu belakangan ini, ialah ingin merdeka dan mau merdeka-lah yang menjadi dasar budi pekerti mereka.

- c. *Kemerdekaan*. Ketiga sifat yang di atas, yaitu setia negara, yakin akan tenaga rakyat dan ingin merdeka adalah kelahiran moral negara ketiga. Moral ini akan memasuki segala urat nadi negara baru itu. Moral itu sangat tinggi, karena budi pekerti itu akan tertanam dalam negara yang berdasar ke-Tuhanan Yang Maha Esa dan beradab kebangsaan.

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT

Keadilan Sosial

Tuan Ketua! Sekiranya dasar-dasar yang mengenai sendi dan moral negara ini dipakai untuk menegakkan negara yang kita ingini, maka belumlah rasanya negara itu akan menimbulkan kegirangan hati yang penuh pada rakyat murba. Oleh sebab itu, hendaklah dari sekarang dipikirkan benar-benar, supaya negara itu jangan dirasakan sebagai ikatan hukum yang menyempitkan hidup rakyat atau dipandang sebagai satu susunan autokrasi atau oligarkhi. Kegembiraan dan kegirangan tentu akan tumbuh, jikalau negara yang disusun atas peradaban kita itu, memberi jaminan dalam aturan *kenpo* atau undang-undang dasar, bahwa beberapa perubahan besar akan berlaku dengan pelantikan negara. Perubahan besar itu tidaklah mengenai susunan negara pusat, daerah bagian tengah dan susunan persekutuan bawahan seperti desa-desa saja, melainkan juga yang mengenai kehidupan ekonomi sosial sehari-hari, yang mengenai diri putra negara. Maka dengan menunjukkan beberapa pasal dengan garis-garis besarnya saja, tentulah rapat budiman ini akan maklum akan apa yang saya maksudkan. Dalam 4 hal itu hendaklah dasar negara baru itu berhubungan langsung dengan keinginan rakyat Indonesia.

- a. *Daerah negara*. Pertama hendaklah pembicaraan dan pembentukan Negara Indonesia pada waktu nanti itu meliputi daerah negara yang sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia, apa lagi dengan keinginan angkatan muda Indonesia. Negara Indonesia akan kurang populernya, dan akan diterima dengan rasa yang agak dingin, jika daerah Negara Indonesia tidak sesuai dengan kemauan angkatan muda itu. Kemauan itu dalam garis-garis besarnya adalah sama, dan tertuju kepada beberapa bagian daerah, maka juga rasa Indonesia yang berlapang

dada dan bersayap lebarlah yang memberi warna kepada rasa Indonesia. Dalam ingatan, impian dan angan-angan angkatan muda dan angkatan terpelajar, maka negara keselamatan tidak mau tahu akan pendaratan perampasan Amerika, Australia di Morotai, Papua, Halmahera dan Tarakan. Walaupun bangsa-bangsa itu akan bertelur dan mencekamkan kuku imperialismenya di daerah-daerah itu, tetap angkatan bangsa dan agama Islam memandang dalam rasa dan otak, bahwa tanah-tanah itu bagian tumpah-darah Indonesia bersama, jadi juga di bawah lindungan Negara Indonesia. *Terra bellica* itu tiada akan dilepaskan begitu saja, karena dengan *occupatio belli* sementara kedudukan daerah itu tinggal tetap di bawah lindungan kedaulatan daerah Indonesia.

Selainnya daripada itu garuda Negara Indonesia tidak mau mengenal *enclaves* atau tanah kepunyaan dalam ruangan hidup bangsa Indonesia, yang telah ditentukan sejak 4 ribu tahun oleh Sang Alam dan sudah diberkati dengan takdir Tuhan Illahi menjadi tumpah-darah Indonesia yang tentu batas dan luasnya. Garuda Negara Indonesia hendak terbang membubung tinggi dengan gagahnya, meliputi daerah yang terhampar dari gentingan Kra di tanah Semenanjung Melayu dan Pulau Weh di puncak utara Sumatra, sampai ke kandung Sampanmangio di kaki Gunung Kinibalu dan Pulau Palma Sangihe di sebelah utara Sulawesi meliputi daerah yang delapan (Sumatra, Jawa, Borneo, Malaya, Selebes, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua) dengan segala pulau-pulau sekelilingnya. Peta daerah daratan dan lautan sekeliling benua kepulauan itu sudah terlukis dengan garis yang tentu dalam dada bangsa Indonesia. Lukisan daerah itu hendak dibelanya dengan jiwa dan darah. Dasar penentuan daerah hendaklah sejajar dengan kemauan itu, supaya Negara Indonesia dipangku oleh putra negara dengan keikhlasan hati yang girang-gembira.

- b. *Penduduk dan putra negara.* Pasal kedua adalah mengenai penduduk Indonesia yang akan menjadi putra negara dan yang tidak akan mendapat keanggotaan-keputraan negara secara penyusunan hukum, maka pada hari pelantikan negara hendaklah sudah tentu pembagian penduduk dengan segala akibatnya tertuju hidup perekonomian dan hak tanah putra negara pada hari pelantikan negara yang akan dipegang segala anak cucu turun-temurun. Jadi, sebelum hari pelantikan hendaklah ada ketentuan tentang kedudukan golongan Peranakan, Arab dan Tionghoa, sebagai golongan akan menjadikan putra Negara Indonesia atau tidak dan apakah akibatnya mendapat atau tidak mendapat anggota keputraan itu, jalan memasuki daerah

dada dan bersayap lebarlah yang memberi warna kepada rasa Indonesia. Dalam ingatan, impian dan angan-angan angkatan muda dan angkatan terpelajar, maka negara keselamatan tidak mau tahu akan pendaratan perampasan Amerika, Australia di Morotai, Papua, Halmahera dan Tarakan. Walaupun bangsa-bangsa itu akan bertelur dan mencekamkan kuku imperialismenya di daerah-daerah itu, tetap angkatan bangsa dan agama Islam memandang dalam rasa dan otak, bahwa tanah-tanah itu bagian tumpah-darah Indonesia bersama, jadi juga di bawah lindungan Negara Indonesia. *Terra bellica* itu tiada akan dilepaskan begitu saja, karena dengan *occupatio belli* sementara kedudukan daerah itu tinggal tetap di bawah lindungan kedaulatan daerah Indonesia.

Selainnya daripada itu garuda Negara Indonesia tidak mau mengenal *enclaves* atau tanah kepunyaan dalam ruangan hidup bangsa Indonesia, yang telah ditentukan sejak 4 ribu tahun oleh Sang Alam dan sudah diberkati dengan takdir Tuhan Illahi menjadi tumpah-darah Indonesia yang tentu batas dan luasnya. Garuda Negara Indonesia hendak terbang membubung tinggi dengan gagahnya, meliputi daerah yang terhampar dari gentingan Kra di tanah Semenanjung Melayu dan Pulau Weh di puncak utara Sumatra, sampai ke kandung Sampanmangio di kaki Gunung Kinibalu dan Pulau Palma Sangihe di sebelah utara Sulawesi meliputi daerah yang delapan (Sumatra, Jawa, Borneo, Malaya, Selebes, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua) dengan segala pulau-pulau sekelilingnya. Peta daerah daratan dan lautan sekeliling benua kepulauan itu sudah terlukis dengan garis yang tentu dalam dada bangsa Indonesia. Lukisan daerah itu hendak dibelanya dengan jiwa dan darah. Dasar penentuan daerah hendaklah sejajar dengan kemauan itu, supaya Negara Indonesia dipangku oleh putra negara dengan keikhlasan hati yang girang-gembira.

- b. *Penduduk dan putra negara.* Pasal kedua adalah mengenai penduduk Indonesia yang akan menjadi putra negara dan yang tidak akan mendapat keanggotaan-keputraan negara secara penyusunan hukum, maka pada hari pelantikan negara hendaklah sudah tentu pembagian penduduk dengan segala akibatnya tertuju hidup perekonomian dan hak tanah putra negara pada hari pelantikan negara yang akan dipegang segala anak cucu turun-temurun. Jadi, sebelum hari pelantikan hendaklah ada ketentuan tentang kedudukan golongan Peranakan, Arab dan Tionghoa, sebagai golongan akan menjadikan putra Negara Indonesia atau tidak dan apakah akibatnya mendapat atau tidak mendapat anggota keputraan itu, jalan memasuki daerah

dada dan bersayap lebarlah yang memberi warna kepada rasa Indonesia. Dalam ingatan, impian dan angan-angan angkatan muda dan angkatan terpelajar, maka negara keselamatan tidak mau tahu akan pendaratan perampasan Amerika, Australia di Morotai, Papua, Halmahera dan Tarakan. Walaupun bangsa-bangsa itu akan bertelur dan mencekamkan kuku imperialismenya di daerah-daerah itu, tetap angkatan bangsa dan agama Islam memandang dalam rasa dan otak, bahwa tanah-tanah itu bagian tumpah-darah Indonesia bersama, jadi juga di bawah lindungan Negara Indonesia. *Terra bellica* itu tiada akan dilepaskan begitu saja, karena dengan *occupatio belli* sementara kedudukan daerah itu tinggal tetap di bawah lindungan kedaulatan daerah Indonesia.

Selainnya daripada itu garuda Negara Indonesia tidak mau mengenal *enclaves* atau tanah kepunyaan dalam ruangan hidup bangsa Indonesia, yang telah ditentukan sejak 4 ribu tahun oleh Sang Alam dan sudah diberkati dengan takdir Tuhan Illahi menjadi tumpah-darah Indonesia yang tentu batas dan luasnya. Garuda Negara Indonesia hendak terbang membubung tinggi dengan gagahnya, meliputi daerah yang terhampar dari gentingan Kra di tanah Semenanjung Melayu dan Pulau Weh di puncak utara Sumatra, sampai ke kandung Sampanmangio di kaki Gunung Kinibalu dan Pulau Palma Sangihe di sebelah utara Sulawesi meliputi daerah yang delapan (Sumatra, Jawa, Borneo, Malaya, Selebes, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua) dengan segala pulau-pulau sekelilingnya. Peta daerah daratan dan lautan sekeliling benua kepulauan itu sudah terlukis dengan garis yang tentu dalam dada bangsa Indonesia. Lukisan daerah itu hendak dibelanya dengan jiwa dan darah. Dasar penentuan daerah hendaklah sejajar dengan kemauan itu, supaya Negara Indonesia dipangku oleh putra negara dengan keikhlasan hati yang girang-gembira.

- b. *Penduduk dan putra negara.* Pasal kedua adalah mengenai penduduk Indonesia yang akan menjadi putra negara dan yang tidak akan mendapat keanggotaan-keputraan negara secara penyusunan hukum, maka pada hari pelantikan negara hendaklah sudah tentu pembagian penduduk dengan segala akibatnya tertuju hidup perekonomian dan hak tanah putra negara pada hari pelantikan negara yang akan dipegang segala anak cucu turun-temurun. Jadi, sebelum hari pelantikan hendaklah ada ketentuan tentang kedudukan golongan Peranakan, Arab dan Tionghoa, sebagai golongan akan menjadikan putra Negara Indonesia atau tidak dan apakah akibatnya mendapat atau tidak mendapat anggota keputraan itu, jalan memasuki daerah

sudah berumur tua dan berkeadaban luhur. Bangsa Indonesia menjelma kembali, setelah menderita perjuangan dan berperang. Kemerdekaan negara itu meliputi daerah yang luas, seluas sebuah benua kepulauan yang subur, makmur dan tidak ada bandingannya tentang permai dan indahnya. Rakyat beragama Tuhan dan berkeadaban tinggi.

Kesejahteraan Rakyat yang menjadi dasar dan tujuan Negara Indonesia Merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial.

Negaranya akan dipangku oleh bangsa dan penduduk, yang hampir mendekati 100 juta jiwa. Inilah Negara Kesejahteraan baru, yang sudah besar dan mulia pada hari pelantikan. Dalam peperangan dunia pertama bangsa Indonesia dengan cita-citanya terjerumus ke dalam jurang penjajahan. Dalam peperangan dunia kedua, berkat bantuan Balatentara Dai Nippon, dan berkat kesungguhan perjuangan rakyat Indonesia kita ditakdirkan Tuhan naik dari kedudukan jajahan menjadi rakyat Negara Merdeka.

Jadi, bentuk Negara Indonesia yang merdeka berdaulat itu ialah suatu Republik Indonesia yang tersusun atas faham *unitarisme*.

Inilah nikmat peperangan suci yang tak ada taranya dalam sejarah dunia. Kita mengucapkan syukur dan terima kasih dengan tidak ada hingganya kepada korban jiwa dan korban senjata; juga turunan kita akan memperingati peristiwa itu setiap waktu mereka mendapat lindungan di bawah susunan negara baru. Tidak di mana-mana, melainkan di sinilah di tanah Indonesia, sejarah dunia berputar dan memulai zaman baru.

Tuan Ketua! Habislah pembicaraan tentang asas kemanusiaan, kebangsaan, kesejahteraan dan dasar yang tiga, yang diberkati kerahmatan Tuhan, yang semuanya akan menjadi tiang negara keselamatan yang akan dibentuk.

Dengan ini saya mempersembahkan kepada sidang sebagai lampiran suatu rancangan sementara berisi perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Dua hari yang lampau Tuan Ketua memberi kesempatan kepada kita sekalian juga boleh mengeluarkan perasaan. Memang orang Indonesia berpikir dengan hati dan berasa dengan jantung. Baiklah sebagai penutup saya curahkan perasaan saya dengan syair.

REPUBLIK INDONESIA

Abadilah Republik Indonesia
Untuk selama-lamanya,
Yang dilindungi tumpah-darah
Benua kepulauan yang indah,
Antara cakrawala langit yang murni
Dengan bumi tanah yang sakti.

Di samping teman, di hadapan lawan
Negara berdiri ditakdirkan Tuhan,
Untuk keselamatan seluruh bangsa
Supaya berbahagia segenap ketika;
Berbudi setia, tenaga Merdeka
Dengan menjunjung kedaulatan Negara.

Di atas abu negara kedua
Kami membentuk negara ketiga,
Diiringkan lagu Indonesia Raya;
Di bawah kibaran bendera bangsa,
Di sanalah rakyat hidup berlindung,
Berjiwa merdeka, tempat bernaung.

Kami bersiap segenap ketika,
Dengan darah, jiwa dan raga,
Membela negara junjungan tinggi
Penuh hiasan lukisan hati:

Melur-cempaka dari daratan
Awan angkasa putih kelihatan
Buih gelombang dari lautan.

Hati yang mukmin selalu meminta
Kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Supaya Negara Republik Indonesia;
Kuat dan kokoh selama-lamanya
Melindungi rakyat, makmur selamat,
Hidup bersatu di laut-di darat.

Sedemikianlah pidato saya, Tuan Ketua, dengan mengucapkan
sekali lagi terima kasih.